



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHIDAH
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEMITRAAN, RISET, INOVASI, DAN ALUMNI
3. NHK : 932227

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 545.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/62 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 152.770.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX 2DP-RA A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.690.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 E MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.080.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA AVANZA G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.321.456

F. HARTA LAINNYA Rp. 51.049.999

Sub Total Rp. 756.141.455

III. HUTANG Rp. 446.279.553

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 309.861.902

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.